

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal. Amerika Serikat merupakan negara di bagian Amerika Utara dan berbatasan dengan Kanada di utara dan Meksiko dibagian selatan. Terhitung sejak tahun 2018 populasi di Amerika Serikat mencapai 329,256,465 orang dengan luas wilayah 9,83 KM² yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara terluas ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga didunia (Central Intelligency Agency, 2019).

Amerika Serikat merupakan negara konsumen minyak terbesar didunia dengan angka hampir mencapai 20 juta barel per hari (bph). Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat industrialisasi dan jumlah populasi sehingga meningkatkan jumlah permintaan minyak sementara angka produksi minyak di Amerika Serikat hanya 10-15 juta bph sehingga Amerika Serikat perlu mendapatkan minyak dari Timur Tengah (Muttaqiena, 2018).

Timur Tengah merupakan wilayah dengan penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Irak merupakan negara yang terletak di Timur Tengah dengan jumlah cadangan minyak terbesar setelah Arab Saudi. Pada bulan Februari 2019 tercatat bahwa Irak memiliki cadangan minyak sebanyak 142 miliar barel. Melihat banyaknya cadangan minyak yang dimiliki negara-negara Timur Tengah, terutama Irak, tidak heran mengapa Amerika Serikat memfokuskan politik luar negerinya ke Timur Tengah.

Hal tersebut kemudian menyebabkan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak yang dimulai sejak tahun 2003 yang kemudian setelah invasi Amerika Serikat berakhir membangkitkan kelompok-kelompok ekstremis. Abu Mus'ab Az Zarqawi merupakan seorang yang dididik untuk berjihad dan berperang mendirikan sebuah kelompok ekstremis yaitu *Jamaah Tauhid wa-i Jihad* (JTJ) yang merupakan cikal bakal ISIS.

Kemudian pada tahun 2004 kelompok tersebut menyatakan kesetiannya kepada Al-Qaeda setelah Amerika Serikat menginvasi Irak. Kemudian Osama bin Laden mengangkat Zarqawi sebagai pemimpin Al-Qaeda cabang Irak (AQI) (Tambunan, 2014).

Pada tahun 2006 Al-Qaeda kemudian memerintahkan JTJ untuk berkerjasama dengan kelompok-kelompok ekstremis yang juga berafiliasi dengan Al-Qaeda yaitu Jaish At-Taifha Al Mansoura, Katbiyan ,Ansar At-Tawhid was-Sunnah, Faksi Saray Al-Jihad, Brigade Al-Ghuraba, dan Al-Ahwal Brigade yang kemudian terbentuklah Mujahedeen Syuraa Council (MSC) (Tambunan, 2014).

Pemimpin AQI, Zarqawi terbunuh pada tahun 2006 setelah pasukan udara Amerika Serikat menembaknya di dekat pusat kota Baquba (The Economist, 2006). Pada tahun 2006 selepas kematian Zarqawi, aliansi MSC sepakat untuk membentuk *Islamic State of Iraq* (ISI) dengan menunjuk Abu Omar Al Quroisy Al Hussaini Al Baghdadi yang merupakan mantan anggota pasukan keamanan Irak yang dipecat karena ideologi ekstrimisnya sebagai ketuanya. (Tambunan, 2014)

Dalam aksinya, ISI seringkali menebar ketakutan dengan melakukan bom bunuh diri sehingga sangat meresahkan masyarakat Irak. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan Abu Omar Al Baghdadi tidak berlangsung lama, Al Baghdadi tewas dibunuh pasukan Amerika Serikat yang beroperasi bersama pasukan keamanan Irak pada tahun 2013 (Tambunan, 2014) .

Kepemimpinan ISI kemudian diteruskan oleh Abu Bakar Al Baghdadi dimana pada era Abu Bakar Al Baghdadi ISI menyatakan bergabung bersama sebuah kelompok jihadis pemberontak asal Suriah yaitu Jabhat An-Nusra (JN) dan membentuk kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Tetapi kemudian JN malah menyatakan bahwa JN tidak bersedia bergabung dengan ISI karena JN hanya berfokus pada perjuangannya memberontak rezim Bashar Al-Assad di Suriah (Tambunan, 2014).

Al-Qaeda juga kemudian mengikuti jejeak JN untuk memutuskan hubungan dengan ISIS karena menurut Al-Qaeda, ISIS justru memperburuk citra Islam dengan aksi terornya

seperti pembunuhan dan bom bunuh diri yang menjadikan masyarakat Irak dan Suriah yang beragama muslim sebagai sasarannya (Tambunan, 2014).

Melihat banyaknya tindakan-tindakan teror yang dilancarkan oleh ISIS, dunia internasional secara kolektif mengecam tindakan-tindakan ISIS. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kepentingan yang besar di Timur Tengah, melihat tindakan ISIS dapat mengancam keberlangsungan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, maka Amerika Serikat pun tentu melakukan upaya-upaya untuk membendung aksi ISIS.

Keseriusan Amerika Serikat dalam mengajak dunia internasional untuk memerangi ISIS dapat dilihat dari upayanya membentuk koalisi bersama negara-negara lain untuk memerangi ISIS (Deutsche Welle, 2014). Upaya Amerika Serikat dalam membentuk koalisi internasional untuk memerangi ISIS mendapat tanggapan baik dari dunia internasional, hal tersebut dapat dilihat ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, Mengklaim bahwa sudah ada 40 negara yang bersedia menjadi bagian dari koalisi internasional Amerika Serikat (Tempo.co, 2014).

Tidak hanya membentuk koalisi internasional, Amerika Serikat bersama dengan koalisi internasionalnya juga melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang menggunakan militernya untuk memerangi ISIS. Berbagai macam serangan dilancarkan oleh pasukan militer Amerika Serikat beserta koalisinya terhadap ISIS (Krieg, 2016).

Strategi yang penyerangan dilakukan Amerika Serikat dan koalisinya terhadap ISIS adalah dengan menyerang wilayah-wilayah utama yang telah dikuasai oleh ISIS seperti operasi penyerangan ISIS di Mosul pada tahun 2016 (BBC, 2016) hingga penyerangan di wilayah Baghouz yang merupakan desa terakhir yang dihuni oleh ISIS pada tahun 2019 hingga akhirnya ISIS dinyatakan kalah setelah pasukan ISIS dihabiskan oleh koalisi internasional Amerika Serikat yaitu *Syrian Democratic Forces* (SDF) (Yasinta, 2019).

Amerika Serikat sejak era pemerintahan George Bush dan beberapa presiden sebelumnya memang telah menaruh fokus

politik luar negerinya pada Timur Tengah karena memang Amerika Serikat membutuhkan Timur Tengah yang memiliki cadangan minyak yang melimpah. Fokus tersebut berlangsung terus sampai pemerintahan-pemerintahan setelahnya, yaitu Barrack Obama dan Donald Trump.

Barrack Obama merupakan Presiden Amerika Serikat yang diusung oleh Partai Demokrat. Barrack Obama kemudian tetap menaruh terorisme, terutama ISIS. Obama kemudian sempat mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk bersatu, tidak memandang suku, agama dan ras untuk bersama-sama melawan ISIS. Obama juga kemudian membentuk koalisi internasional untuk melawan ISIS.

Tetapi, kebijakan Obama tersebut mendapat kritik dari Partai Republik karena dinilai sangat lembek terhadap ISIS. Setelah Barrack Obama merampungkan jabatannya selama dua periode sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang berasal dari Partai Republik kemudian melanjutkan estafet kepresidenan Amerika Serikat. Dalam pemerintahannya, Donald Trump acap kali melancarkan serangan-serangan langsung di Timur Tengah untuk melawan ISIS bahkan hingga menewaskan banyak warga sipil. Kebijakan keras Donald Trump terhadap ISIS ini juga bahkan mendapat perhatian dari *Human Right Watch* (HRW).

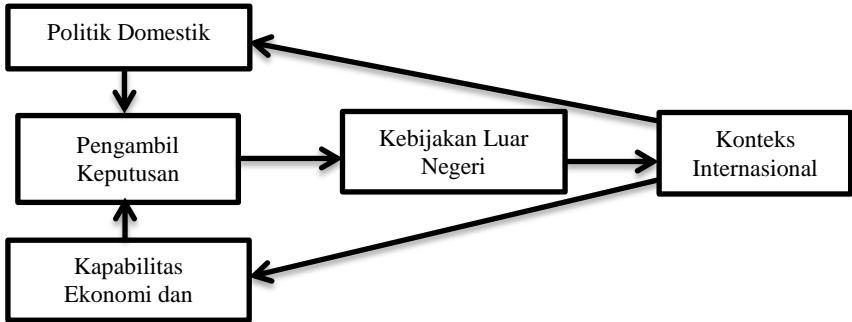
B. Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat era Donald Trump bersifat lebih represif dibandingkan kebijakan luar negeri era Barrack Obama dalam mengelola kasus ISIS ?

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Penulis menggunakan pendekatan William D. Coplin tentang bagaimana suatu pemerintahan dalam negara merumuskan kebijakan luar negeri dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to International Politic*" dimana Coplin mengatakan bahwa dalam menentukan kebijakan luar negeri dapat digambarkan dengan bagan berikut (Coplin W. D., 2003) :



Gambar 1. 1 Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Coplin

Dalam bagan tersebut Coplin menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam menentukan suatu kebijakan luar negeri yaitu yang pertama adalah ; kondisi politik dalam negeri, kapabilitas militer dan ekonomi dan konteks internasional yang berarti posisi khusus suatu negara terhadap hubungannya negara lain.

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin ada 2 pihak yang sangat berperan dalam penentuan kebijakan luar negeri yang tentunya diputuskan berdasarkan kondisi politik dalam negeri suatu negara berjalan. Pengambil keputusan yang merupakan pemerintahan tertinggi suatu negara dalam memutuskan kebijakan dipengaruhi oleh suatu pihak yang disebut Coplin sebagai *politic influencer*. Pihak penguasa tentu mengincar suara-suara dukungan terhadap rezimnya dari pihak *politic influencer* seperti masyarakat, pengusaha dan partai-partai politik (Coplin W. D., 2003).

Barrack Obama merupakan presiden Amerika Serikat yang berasal dari Partai Demokrat yang notabene memiliki orientasi yang berbeda dengan Donald Trump yang berada didalam partai rivalnya yaitu Partai Republik. Orientasi suatu partai tentu mempengaruhi bagaimana seorang penguasa menentukan arah kebijakan politik nya baik dalam lingkup domestik maupun luar negeri.

Obama mengkampanyekan akan mengakhiri perang dan menepati janjinya ketika terpilih menjadi presiden dengan menarik pasukan dari Irak pada bulan Agustus tahun 2010 (Debora, Obama dan Janji untuk Hentikan Perang, 2017). Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh orientasi Partai Demokrat yang merupakan partai yang menampung aspirasi-aspirasi kaum minoritas termasuk Muslim (Cipto, Politik dan Pemerintahan Amerika, 2007) sehingga, Obama terlihat cenderung ingin memperbaiki citra Amerika Serikat di Dunia Islam ketika lebih mengandalkan sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk mengalahkan ISIS (CNN Indonesia, 2015).

Kemudian kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat setelah Obama yaitu Donald Trump juga sempat menarik 2000 pasukan militer Amerika Serikat dan lebih memfokuskan dalam memberi bantuan terhadap koalisi Suriah dalam mengalahkan ISIS (Walt, 2018) . Tetapi pada akhirnya kebijakan tersebut mendapat kritikan dari beberapa politisi Partai Republik karena dianggap berlawanan dengan orientasi Partai Republik yang ingin memerangi ISIS secara ofensif (Embury-Dennis, 2018). Pada akhirnya, Trump tetap memprioritaskan penggunaan kekuatan militer untuk memerangi ISIS bahkan Trump melakukan 40 serangan selama 5 hari di bulan Maret yang mana lebih banyak dari total tahunan pemerintahan Obama selama dua tahun terakhir (Brechenmacher, 2017).

b. Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Kapabilitas suatu negara dalam bidang ekonomi dan militer menjadi faktor penting yang menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara, dalam arti semakin kuat perekonomian dan militer suatu negara dapat semakin kuat juga dalam mempertahankan kepentingannya di negara lain melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat (Coplin W. D., 2003).

Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terkuat didunia (Statistic Times,

2018) dan begitu juga dalam bidang militernya, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terkuat didunia (Global Fire Power, 2019). Hal tersebut menyebabkan konsumsi minyak Amerika Serikat mencapai angka yang tinggi dan Timur Tengah merupakan wilayah dengan jumlah minyak yang melimpah sehingga Amerika Serikat memfokuskan kepentingannya di Timur Tengah.

Barrack Obama membuat kebijakan untuk menghemat pengeluaran Amerika Serikat karena pada masa awal Obama menjabat yaitu pada tahun 2008, Amerika Serikat sedang dilanda krisis ekonomi yang salah satu penyebabnya adalah borosnya anggaran untuk Perang Irak dan Perang Afghanistan sehingga Obama juga mengurangi anggaran militer sementara Donald Trump menganggarkan dana yang besar untuk bagian militer karena Amerika Serikat menganggap ISIS sebagai ancaman yang menghambat kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah sehingga Amerika Serikat perlu mengerahkan dan terus mendominasi kekuatan militernya supaya kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dapat berjalan dengan baik (Amadeo, 2019).

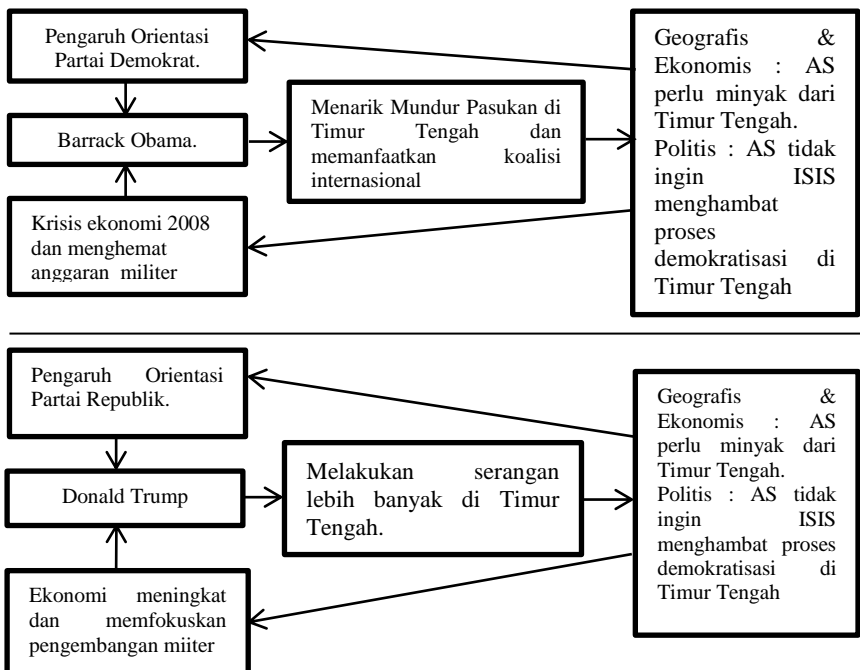
c. Konteks Internasional

Konteks Internasional menjelaskan bagaimana posisi suatu negara terhadap negara lain, konteks internasional juga menjelaskan sikap suatu negara terhadap negara lain dan menurut Coplin ada tiga hal yang mempengaruhi bagaimana konteks internasional dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yaitu geografis, politis dan ekonomis (Coplin W. D., 2003).

Dari segi geografis dan ekonomis dapat kita perhatikan bahwa Amerika Serikat membutuhkan jumlah minyak dalam jumlah besar dan Timur Tengah merupakan wilayah dengan jumlah cadangan minyak yang besar sehingga Amerika Serikat perlu melakukan eksplorasi minyak di Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhannya dan dalam hal politis Amerika Serikat

menganggap bahwa kelompok-kelompok ekstremis di Timur Tengah seperti ISIS merupakan ancaman besar bagi kelangsungan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat juga tidak ingin ISIS mengganggu proses demokrasi yang sudah berjalan di negara-negara di Timur Tengah karena cita-cita ISIS adalah mendirikan negara Khilafah yang bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat.

Untuk mencapai kepentingan tersebut, Obama dan Trump memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda. Barrack Obama ingin tetap memerangi ISIS tetapi juga ingin memperbaiki citra Amerika Serikat di Dunia Islam sementara Donald Trump ingin tetap memerangi ISIS secara ofensif dengan kekuatan militer Amerika Serikat.



Gambar 1. 2 Aplikasi Teori Coplin era Obama dan Trump.

D. Hipotesa

Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap ISIS pada era pemerintahan Donald Trump bersifat lebih represif karena didukung beberapa faktor sebagai berikut :

1. Politik Domestik: Partai Republik memiliki orientasi yang lebih tegas terhadap terorisme dibandingkan Partai Demokrat yang kemudian mempengaruhi Donald Trump dalam mengambil kebijakan luar negerinya.
2. Kapabilitas Ekonomi dan Militer: Kondisi perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan dan kemudian Donald Trump juga mengalokasikan dana lebih besar untuk militer sehingga kebijakan yang diambil pun menjadi lebih represif.
3. Konteks Internasional : Keperluan Amerika Serikat akan banyaknya jumlah minyak dan kepentingan untuk menanamkan pengaruh dan ideology Amerika Serikat di Timur Tengah juga menyebabkan Amerika Serikat memfokuskan kebijakan luar negerinya terhadap ISIS yang mengganggu kepentingan Amerika di Timur Tengah

E. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama selama dua periode (2009-2017) hingga pemerintahan Presiden Donald Trump yang dilantik pada tahun 2017 hingga saat ini tahun 2019.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap ISIS yang diambil pada era pemerintahan Presiden Barrack Obama dan Presiden Donald Trump;
2. Menganalisa perbandingan kebijakan yang diambil oleh Presiden Barrack Obama dan Donald Trump terhadap ISIS.
3. Menganalisa alasan mengapa kebijakan Donald Trump terhadap ISIS bersifat lebih represif dibandingkan kebijakan yang diambil oleh Barrack Obama.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu studi literatur berupa data tertulis yang diutamakan berbentuk buku, jurnal, koran, diktat kuliah serta data tertulis yang berbentuk elektronik seperti *e-book*, *e-journal*, dan *website* yang kemudian dianalisa sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu membandingkan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap ISIS pada era pemerintahan Barrack Obama dan Donald Trump.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan terdiri dari :

Bab I yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan rencana sistem penelitian.

Bab II membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah pada masa sebelum kemunculan ISIS yaitu bagaimana orientasi Amerika Serikat pada masa Perang Dingin adalah untuk menanamkan pengaruh nya di dunia lebih besar dari musuh Amerika Serikat yaitu Uni Soviet. Kemudian akan dijelaskan juga politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah pada masa setelah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia dimana pada masa itu terjadi berbagai macam dinamika yang mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan luar negeri nya terhadap Timur Tengah seperti tragedi serangan teroris 9/11 di New York, Amerika Serikat yang mengawali invasi Amerika Serikat di Afghanistan hingga terjadinya perang di di Irak dan Afghanistan hingga pada saat terjadinya Perang Sipil di Suriah.

Bab III menjelaskan tentang awal mula kemunculan ISIS yang kemudian akan dijelaskan juga tujuan dan cita-cita ISIS yang menyebabkan Amerika Serikat, baik pada masa Obama dan Trump untuk memfokuskan politik luar negerinya ke ISIS. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana Barrack Obama dan Donald Trump menentukan kebijakan luar negerinya dalam

merespon keberadaan ISIS yang mengganggu keamanan dan kepentingan Amerika Serikat.

Bab IV menjelaskan alasan mengapa terjadi perbedaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap ISIS pada era pemerintahan Presiden Barrack Obama dan Donald Trump dimana kebijakan Trump dinilai bersifat lebih represif terhadap ISIS. Analisa akan dilakukan berdasarkan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dicanangkan oleh William D. Coplin yaitu dengan menimbang beberapa faktor yang akan mempengaruhi Presiden dalam mengambil kebijakan luar negerinya.

Bab V menjadi penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang disusun dari seluruh bab yang telah dipaparkan.